

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM TERHADAP
JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT 2**
(Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kedaton)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Dalam Program Studi Akuntansi Syariah**

**Oleh
DINA PRATIWI
NPM: 1651030004**

Jurusan: Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM TERHADAP
JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT 2**
(Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kedaton)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Dalam Program Studi Akuntansi Syariah**

**Oleh
DINA PRATIWI
NPM: 1651030004**

Jurusan: Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt.

Pembimbing II : Yulistia Devi, M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak merupakan salah satu reformasi pajak yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong pemenuhan pajak secara sukarela. PP No.23/2018 diterbitkan tanggal 1 Juli 2018 dengan tarif pajak yang cukup rendah yaitu 0.5% dari jumlah wajib pajak atas omset atau penjualan bruto yang kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Salah satu tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih berperan aktif dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Terdapat Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Tingkat Jumlah Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kedaton? Apakah Terdapat Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Tingkat Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada KPP Pratama Kedaton? Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap penurunan tarif pajak UMKM? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Kedaton sesudah adanya penurunan tarif pajak. untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak di KPP Pratama Kedaton sesudah adanya penurunan tarif pajak dan untuk menjelaskan pandangan Ekonomi Islam terhadap penurunan tarif pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan periode waktu selama 24 bulan yaitu 6 bulan sebelum dan 18 bulan sesudah penerapan PP No.23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis *Mann whitney test* yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi pada jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sesudah penerapan PP No.23/2018. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak (*software*) komputer SPSS 19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Dan menurut pandangan Ekonomi Islam penurunan tarif pajak ini dirasa lebih memberikan keadilan bagi para pelaku UMKM.

Kata kunci : Wajib Pajak, Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2, PP No. 23 Tahun 2018 tentang Penurunan Tarif Pajak, Pandangan Ekonomi Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dina Pratiwi

NPM : 1651030004

Jurusan/prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kedaton)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.



Bandar Lampung 2020

Penulis

Dina Pratiwi
NPM: 1651030004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131
Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM (PP
Nomor 23 Tahun 2018) Terhadap Tingkat Jumlah Wajib Pajak
dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada Wajib Pajak
Yang Terdaftar di KPP Pratama Kedaton)
Nama : Dina Pratiwi
NPM : 1651030004
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunagosyahkan dan di Pertahankan Dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt
NIP. 197009262008011008

Pembimbing II

Yulistia Devi, M.S.Ak.
NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Any Eliza, M. Ak.
NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suramin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Proposal dengan judul: **Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4, Ayat 2 (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kedaton)**, Disusun oleh: **DINA PRATIWI**, NPM: **1651030004**, Jurusan: **Akuntansi Syari'ah**. Telah diseminarkan pada hari/tanggal: **Senin, 18 April 2020**.

TIM MUNAQOSAH

Ketua

: **A. Zuliansyah, S.Si., MM**

Sekretaris

: **Ainul Fitri, M.Acc**

Penguji I

: **Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si**

Penguji II

: **Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 198008012003121001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah:286)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah di berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmad-nya karya ini dapat di selesaikan. Skripsi ini hamba persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta , ayahanda Ponijo dan ibunda Surati yang telah merawatku, membesarkan serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu di berikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakak ku tersayang, Maryanti, Maryono, Wahyuni, Maidayati, Agustina dan adikku tersayang yaitu Dodi Setiawan serta keluarga besar yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakanku untuk mencapai cita-cita.
3. Almameterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Dina Pratiwi dilahirkan di jatimulyo pada tanggal 10 Desember 1998, merupakan anak ke- enam dari pasangan Bapak Ponijo dan Ibu Surati orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis.

Pendidikan penulis dimulai di Sekolah Dasar SD N 5 Jatimulyo Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2009, berlanjut di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 20 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMK PGRI 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015.

Tahun 2016, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Akuntansi Syari'ah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kedaton)” dapat di selesaikan.

Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran Agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahilliyah menuju zaman Islamiah yang penuh dengan IPTEK serta di Ridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa di haturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, M.Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi dan kemudahan kepada mahasiswa;
3. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt. selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Ibu Yulistia Devi, M.S.Ak. selaku dosen pembimbing II yang banyak meluangkan waktu untuk membantu dan

membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Dosen-Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung;
5. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
6. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan;
7. Reko Anjariadi, S.E. Ak, MSE, MPP, CA selaku Waskon 4 KPP Pratama Kedaton dan Bapak, Ibu Pegawai KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung yang telah memberikan informasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat ku tersayang, Ayu Agdeti Regina, Bety Tiara Putri, Umu Khalifah yang selalu memberi suport kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2016, Abdul Manan, Abdul Munir, Ahmad Jian Sastra Ramadhan, Aiman Yadi, Della Ayu Safitri, Destri Anggraini, Dwi Windanarti, Endri Wibowo, Evita Veron, M. Farid Zaki, Lusiyana, Riami Amini Aru, Shinta Tristia Hangayumi terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung;
10. Orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis yaitu Arya Rizayan Putra.

11. Sahabat KKN RM Desa Gunung Megang Kelompok 136 UIN Raden Intan Lampung, terima kasih atas dukungannya;

12. Almameter UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk dimohon kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung,2020
Penulis

Dina Pratiwi
1651030004

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	ii	
ABSTRAK	iii	
SURAT PERNYATAAN	iv	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v	
PENGESAHAN.....	vi	
MOTTO	vii	
PERSEMBAHAN.....	viii	
RIWAYAT HIDUP	vix	
KATA PENGANTAR.....	x	
DAFTAR ISI.....	xiii	
DAFTAR TABEL	xv	
DAFTAR GAMBAR.....	xvi	
DAFTAR LAMPIRAN	xvii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Penegasan Judul	1	
B. Alasan Memilih Judul	2	
C. Latar Belakang	4	
D. Batasan Masalah	13	
E. Rumusan Masalah	14	
F. Tujuan Penelitian	14	
G. Manfaat Penelitian	15	
BAB II Landasan Teori		
A. Pajak		
1. Pengertian Pajak	17	
2. Teori Pengenaan Pajak	18	
3. Macam- Macam Pajak	20	
4. Sistem Pemungutan Pajak	22	
5. Syarat Pemungutan Pajak	23	
6. Wajib Pajak.....	24	
B. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....		25

C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	27
1. Penghasilan yang dikecualikan dari objek PP 23 tahun 2018	28
2. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	28
3. Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	29
D. PPh Final (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)	30
E. Definisi Pajak Dalam Islam	31
F. Tinjauan Pustaka	38
G. Kerangka Berpikir	42
H. Hipotesis	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel	45
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Definisi Operasional Penelitian.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Uji Normalitas	56
2. Uji Homogenitas	57
3. Uji Hipotesis	58
a. Uji Hipotesis Jumlah Wajib Pajak.....	59
b. Uji Hipotesis Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2	63
B. Pembahasan	
1. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Tingkat Jumlah Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung	68
2. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung	70
3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap penurunan tarif pajak	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Kedaton Sebelum dan Setelah Penurunan Tarif Pajak.....	11
Tabel 2	Sampel Data Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Kedaton Sebelum dan Setelah Penurunan Tarif Pajak.....	46
Tabel 3	Hasil output uji normalitas	56
Tabel 4	Hasil output uji homogenitas	57
Tabel 5	<i>Mann Whitney Test Ranks</i> Jumlah Wajib Pajak.....	59
Tabel 6	Hasil Output Mann Whitney Test Statistics Jumlah Wajib Pajak	60
Tabel 7	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak.....	61
Tabel 8	<i>Mann Whitney Test Ranks</i> Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2	63
Tabel 9	Hasil Output Mann Whitney Test Statistics Penerimaan Pajak	64
Tabel 10	Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berfikir.....	43
----------	------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset

Lampiran 2 : Blangko Bimbingan

Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Lampiran 4 : Uji Normalitas

Lampiran 5 : Uji Homogenitas

Lampiran 6 : Uji *Mann Whitney Test* wajib pajak

Lampiran 7 : Uji *Mann Whitney Test* penerimaan PPh pasal 4 ayat 2

Lampiran 8 : Tabel U *Mann Whitney Test*

Lampiran 9 : Dokumentasi





BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka kiranya judul skripsi ini perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Dengan adanya penegasan ini diharapkan tidak ada lagi kekeliruan dalam pemaknaan judul. Judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kedaton)”**. Untuk Menghindari kesalahfahaman dan memahami maksud judul skripsi, terlebih dahulu diperlukan penegasan terhadap kata-kata dalam judul yang dianggap perlu sebagai berikut :

1. **Pengaruh**, yaitu suatu daya yang timbul atau ada dari sesuatu, misalnya orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹
2. **Penurunan Tarif Pajak**, Penurunan itu sendiri memiliki arti pengurangan/perubahan (harga) yang lebih kecil dari sebelumnya.² Sedangkan tarif pajak yaitu tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang, dan besarnya tarif pajak itu sendiri dapat dinyatakan dalam

¹ “Pengaruh” (on-line), tersedia di <https://kbbi.web.id/pengaruh> , diakses tgl 23 Desember 2019

² “Penurunan” (On-Line), tersedia di <https://kbbi.web.id/penurunan>, di akses tgl 23 Desember 2019

persentase.³ Jadi penurunan tarif pajak adalah perubahan persentase tarif pajak terutang yang lebih kecil dari sebelumnya.

3. **Wajib pajak**, merupakan badan atau orang pribadi atau si pembayar pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban dalam perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan itu sendiri.⁴
4. **PPh Pasal 4 Ayat 2**, adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan atas usahanya dan penerimaan pajak setelah adanya penurunan tarif pajak.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam suatu penelitian ilmiah ini, alasan memilih judul merupakan hal yang sangat penting. Dengan kata lain merupakan faktor yang menyebabkan judul ini terpilih. Terdapat beberapa alasan yang penulis dapati untuk menjadikan judul “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada Wajib

³ Waluyo, *perpajakan Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat, 2011), hal.17

⁴ *Ibid.*, hal.23

⁵ “PPh Pasal 4 Ayat 2” (on-line), tersedia di <https://www.online-pajak.com> , diakses tanggal 5 Februari 2020

Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kedaton)” ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Alasan Obyektif

Tarif pajak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan perpajakan, dengan adanya tarif pajak maka wajib pajak dapat berkontribusi sebagian pendapatannya untuk negara. Namun tidak sedikit wajib pajak yang patuh akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia kemungkinan karena tarif pajak yang dikenakan terlalu besar. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya penurunan tarif pajak ini dapat membuat peningkatan terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak untuk negara.

2. Alasan Subyektif

- a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis jalani saat ini yakni berkenaan dengan Akuntansi Syariah.
- b. Judul yang diajukan ini sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Ketersediaan data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga cukup mendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terpadat ke 4 di dunia, dengan populasi sekitar 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia.⁶ Pemerintah selaku pengatur pemerintahan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur negara sebagai penunjang roda pemerintahan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara tentu memerlukan jumlah dana yang tidak sedikit. Secara umum penerimaan negara Indonesia berasal dari 3 sumber utama yaitu pajak, bukan pajak dan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari ketiga sumber tersebut pajak mengambil porsi terbesar dalam menyumbang pendapatan negara.⁷

Di Indonesia pajak sangat berkontribusi bagi pembangunan negara. Karena pajak merupakan penyumbang dana terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menyumbang sebesar 85,6% pada APBN. Tentunya bukan merupakan jumlah yang sedikit bagi pemasukan kas negara. Untuk itulah pemerintah melalui program-programnya lebih giat lagi berupaya meningkatkan pemasukan dari sektor pajak.⁸

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan imbalan atau timbal balik, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.⁹ Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya

⁶ <https://databoks.katadata.co.id> (on-line) diakses tanggal 19 mei 2020

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1

⁸ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (on-line) diakses tanggal 19 mei 2020

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta:ANDI, 2008), hal. 1

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Ada dua jenis pajak di Indonesia, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi PPh, PPN, PPn Bm, dan PBB , sedangkan pajak daerah dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu pajak daerah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak daerah kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, pajak sarang burung dan bea materai, pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.¹⁰

Untuk mencapai penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat Indonesia sudah tentu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya yaitu dengan pajak penghasilan.¹¹

Seperti yang kita ketahui, peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan pajak dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak dengan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang ada.

¹⁰ <https://www.online-pajak.com/macam-macam-pajak> (on-line) diakses tanggal 19 mei 2020

¹¹ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer : Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal. 106

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri ke Jendral Pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan adalah melalui pengawasan terhadap masyarakat atas pelaksanaan *self assessment* sehingga diberikan wewenang dibidang perpajakan antara lain pengukuhan sebagai wajib pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang apabila masyarakat tidak membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.¹²

Dalam pandangan islam, pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, seperti yang kita ketahui bahwa peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara. Pajak dalam kehidupan kaum muslimin masuk dalam ranah ekonomi Islam, dimana islam memandang pajak, menurut Yusuf Qardawi dalam Gustami pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum, disatu pihak untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan- tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.¹³

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil tentang pajak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 29.

¹² Thomas Sumarsan , *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Indeks,2013), hal.156

¹³ Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, edisi Revisi, (jakarta:rajawali pers:2011), h.31

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صُغُرُونَ.

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk (Qs.At-Taubah : 29).”¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban warga negara membayar pajak secara patuh terhadap negara sebagai bentuk perwujudan pengabdian dan peran rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Selain ayat di atas, di antara dasar dan panduan pembolean pemungutan pajak adalah seperti hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat."¹⁵ Hadis tersebut menunjukkan bahwa memang diperbolehkannya pemerintah untuk menarik sebagian harta penduduknya selain dari apa yang telah mereka keluarkan dari zakat, dalam hal

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2013) Qs.At-Taubah (9) : 29 h.193

¹⁵ Kazwaini, (2017). “Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran alMawardi”. Jurnal an-Nida, Vol. 41 No. 1, Juni 2017. <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Anida/article/download/4639/283> (diakses pada tanggal 13 Januari 2021).

ini adalah pajak. Namun, menurut Imam Syatibi penarikan ini tidak serta merta dipungut begitu saja, melainkan apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat. Dari ayat Alquran dan hadits di atas dapat kita pahami bahwa mengambil pajak dari masyarakat merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat sebagai bentuk ketaatannya kepada pemerintah. Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dapat digunakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, termasuk bagi UMKM, karena pajak dapat digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal permodalan maupun pembinaan.¹⁶

Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan pajak salah satunya pajak penghasilan. Dalam sistem pemungutan pajak penghasilan diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Serta hal tersebut juga menjadi tanggung jawab

¹⁶ Muhammad Turmudi, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)". Jurnal al'Adl, Vol. 8 No. 1, Januari 2015. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/353/339> (diakses pada 13 Januari 2021).

Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan penyuluhan perpajakan agar masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan pajak penghasilan.¹⁷

Salah satu pajak penghasilan di Indonesia adalah pajak penghasilan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM diketahui bahwa kontribusi UMKM mencapai lebih 60 persen terhadap PDB. Dengan peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian di Indonesia, diharapkan UMKM dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 ini dapat terealisasi. Dengan demikian, diperlukan dukungan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia antara lain dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM.¹⁸

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 memberikan sinyal positif kepada UMKM bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya peningkatan UMKM di Indonesia sehingga diharapkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara bertambah besar. Penurunan tarif PPh Final menjadi setengah persen (0,5%) akan memberikan manfaat yang besar antara lain meningkatkan pertumbuhan UMKM yang akan memperkuat ekonomi Indonesia dan diharapkan akan memperkuat basis data dari otoritas pajak. Disisi lain, kebijakan menurunkan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi

¹⁷ Perubahan undang-undang penghasilan (On-line) tersedia di <https://www.pajak.go.id> di akses tanggal 6 juli 2020

¹⁸ <https://pajak.go.id/artikel/kebijakan-pph-final-setengah-persen-bagi-umkm-dua-sisi-mata-uang> (On-line) diakses tanggal 7 Juni 2020

0,5 persen juga merupakan salah satu imbas dari banyaknya keluhan para pelaku UMKM tentang tingginya tarif pajak saat itu.¹⁹

Menurut pandangan ekonomi islam, penurunan tarif pajak UMKM dianggap lebih manusiawi, karena dalam ajaran ekonomi islam terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, salah satunya tidak ada sekelompok orang yang berhak mengeksploitasi orang lain. Selain itu, penurunan tarif pajak UMKM dirasa lebih memberikan keadilan bagi para pelaku UMKM.²⁰ Penurunan tarif pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM.

Dalam beberapa penelitian ditemukan fakta bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Romer & Romer (2010) dalam beranda artikel yang berjudul kebijakan PPh Final setengah persen bagi UMKM dua sisi mata uang menemukan fakta bahwa peningkatan pajak sebesar 1 persen dari PDB akan menurunkan riil PDB sebesar 3 persen setelah 2 tahun. Lebih lanjut, OECD (2008) menemukan bahwa PPh Badan dan PPh Orang Pribadi mempunyai dampak paling *harmful* terhadap pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pajak atas konsumsi dan pajak atas properti.²¹ Dengan kata lain memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana penurunan tarif pajak akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (On-Line) tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018> diakses tanggal 7 Juni 2020

²⁰ Muhamad Takhkim, "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat". E-Journal IAIN Ngawi, 2016. On-line <http://ejournal.iainngawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/142> (diakses pada tanggal 13 Januari 2021).

²¹ <https://pajak.go.id/artikel/kebijakan-pph-final-setengah-persen-bagi-umkm-dua-sisi-mata-uang> (On-line) diakses tanggal 7 Juni 2020

demikian, penurunan tarif PPh Final menjadi setengah persen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan akan berdampak signifikan terhadap momentum pemulihan ekonomi di Indonesia dan juga mendukung terlaksananya Reformasi Perpajakan Jilid III melalui penguatan basis data. Berikut data jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Kedaton periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak.

Tabel 1
Data wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak pada KPP Pratama Kedaton

No.	Bulan/Tahun	Wajib Pajak	peningkatan	Tingkat Pertumbuhan (%)	Penerimaan pajak	Peningkatan	Tingkat pertumbuhan (%)
Sebelum Penurunan Tarif Pajak							
1	Januari	1762			1,053,742,277		
2	Februari	1869	107	6,1%	813,126,463	-240,615,814	-22,8%
3	Maret	2623	754	40,4%	1,486,117,488	672,991,025	82,8%
4	April	2213	-410	-15,6%	1,595,213,845	109,096,357	7,3%
5	Mei	2120	-93	-4,2%	865,816,902	-729,396,943	-45,7%
6	Juni	1146	-974	-45,9%	792,240,579	-73,576,323	-8,5%
	Total 2018	11733	-616	-19,2%	6,606,257,554	-261,501,698	13,1%
Sesudah Penurunan Tarif Pajak							
1	Juli	1664	518	45,3%	558,784,424	-233,456,155	-29,5%
2	Agustus	1683	19	1,1%	713,173,722	154,389,298	27,6%
3	September	1669	-14	-0,8%	549,359,021	-163,814,701	-23,0%
4	Oktober	1723	54	3,3%	644,970,666	95,611,645	17,4%
5	November	1798	75	4,4%	740,728,595	95,757,929	14,8%
6	Desember	1910	112	6,9%	839,201,427	98,472,832	13,3%
	Total 2018	10447	764	60,2%	4,046,217,855	46,960,848	20,6%
7	Januari	1966	56	3%	867,290,010	28,088,583	3,3%
8	Februari	2068	102	5,2%	804,515,143	-62,774,866	-7,2%
9	Maret	2165	97	4,7%	914,041,479	109,526,336	13,6%
10	April	2196	31	1,5%	922,554,455	8,512,976	0,9%
11	Mei	2272	76	3,5%	663,152,410	-259,402,045	-28,1%
12	Juni	1931	-341	-15%	492,577,715	-170,574,695	-25,7%
13	Juli	2017	86	4,5%	611,328,526	118,750,811	24,1%
14	Agustus	2056	39	2%	668,722,942	57,394,416	9,4%
15	September	1814	-242	-11,7%	579,130,679	-89,592,263	-13,4%

16	Oktober	2131	317	11,5%	714,496,551	135,365,872	23,4%
17	November	1974	-157	-7,3%	666,580,634	-47,915,917	-6,7%
18	Desember	2990	1016	51,5%	808,465,013	141,884,379	21,3%
	Total 2019	25580	1080	53,4%	8,712,855,557	-30,736,413	14,9%

Sumber: KPP Pratama Kedaton

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setelah adanya penurunan tarif pajak jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan di awal tahun berlakunya peraturan ini akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan pada penerimaan pajaknya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tarif pajak yang diatur dalam peraturan pemerintah nmor 23 tahun 2018 ini memang cukup rendah. Meskipun demikian, adanya perubahan PP ini diharapkan dapat menarik animo wajib pajak dan masyarakat luas untuk lebih sadar akan manfaat dan kegunaan pajak bagi bangsa dan negara. Dengan adanya perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan semakin banyak wajib pajak yang sadar dalam memenuhi perpajakan, dengan sukarela mendaftarkan diri dan membayar pajak dengan benar.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu mengenai PPh Final atas UMKM, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Helmi Sularsih (2018) dan Rury Ceptianingtyas (2019) menyatakan bahwa di masing-masing daerahnya dengan menggunakan tarif PPh Final yang telah diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih efisien dan lebih menguntungkan bagi wajib pajak, dikarenakan tarif PPh Final yang dikenakan lebih kecil dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya pada Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.²² Berbeda dari penelitian diatas menurut Wahyu Suryani, Maslichah, dan Junaidi (2019) bahwasanya tidak ada beda tingkat tumbuhnya Wajib Pajak UMKM awal dan sesudah pengalihan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tetapi ada beda tingkat pendapatan PPh final awal dan setelah pengalihan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.²³

Penelitian ini menjadikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung sebagai objek peneltian. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berisi penurunan tarif PPh Final atas UMKM yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen, bagi pihak pemungut pajak dalam hal ini KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung menjadi sarana untuk meningkatkan jumlah pembayar pajak final dan juga mengoptimalkan pemasukan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kedaton)”.

²² Helmi Sularsih, “Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak Umkm Di Kota Malang”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 3 (2018), hal. 1-8

²³ Wahyu Suryani, Maslichah dan Junaidi, “Pengaruh Pengalihan Pp 46 2013 Menjadi Pp 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di Kpp Pratama Pasuruan”, *E-JRA*, Vol. 8 No. 2, (februari 2019), hal. 38-39

D. Batasan Masalah

Berdasarkan judul yang peneliti ambil yaitu “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kedaton)”. Penelitian ini dibatasi hanya pada jumlah pertumbuhan wajib pajak sesudah diterapkannya PP No 23 tahun 2018 yaitu tentang penurunan tarif pajak UMKM, serta penerimaan pajak atas PPh final. Periode penelitian ini dilakukan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan untuk objek penelitian yang akan dilakukan berada pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang peneliti ambil yaitu “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kedaton)” dengan batasan penelitian yang peneliti paparkan, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Terdapat Perbedaan Pada Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Kedaton Setelah Penurunan Tarif Pajak UMKM?
2. Apakah Terdapat Perbedaan Pada Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 di KPP Pratama Kedaton Setelah Penurunan Tarif Pajak UMKM?
3. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penurunan Tarif Pajak UMKM?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Kedaton setelah penurunan tarif pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui perbedaan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pajak di KPP Pratama Kedaton setelah penurunan tarif pajak UMKM.
3. Untuk menjelaskan pandangan ekonomi islam tentang wajib pajak.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 atas penurunan tarif pajak final. Serta dapat menganalisis pengaruh peraturan pemerintah tersebut terhadap tingkat jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Kedaton.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai saran atau masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam meregulasi peraturan sehingga tetap dapat meningkatkan minat wajib pajak khususnya UMKM dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilan dan pertumbuhan UMKM yang optimal bagi pembangunan nasional.

3. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 atas penurunan tarif pajak final. Serta dapat menganalisis pengaruh peraturan pemerintah tersebut terhadap tingkat wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Kedaton bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sering disingkat APBN tahun 2010, peranan pemerintah perpajakan sudah mencapai 80% dari penerimaan dalam negeri.¹ Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :²

Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan bahwasanya Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Sedangkan Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya Asas dan Dasar Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal.1

² Waluyo, *perpajakan Indonesia* (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2011), hal. 2-3

³ Rochmat Soemitro, *Asas dan dasar Perpajakan 1*, (Bandung : Refika Aditama, 2004) hal.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontreprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2. Teori Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut anantara lain adalah :⁴

- a. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2008), hal. 3-4

b. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

c. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan unsur subjektif adalah dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

d. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk

pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

3. Macam- Macam Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu : Pajak Menurut Golongan, Pajak Menurut Sifat, dan Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya.⁵

a. Pajak Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain tau pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn).

⁵Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hal. 28

b. Pajak Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:⁶

a. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

b. Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada adalah wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

⁶ Thomas Sumarsan , Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Indeks,2013), hal. 49

c. Witholding System

Witholding system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak, antara lain :⁷

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pajak pengenaannya harus adil serta diatur dalam perundang-undangan. Adil adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding.

b. Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-undang (syarat yudiris)

Di Indonesia Pajak diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

⁷ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi...., hal. 34

Pajak dipungut dengan tidak mengganggu proses kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

d. Pungutan Harus Efektif (syarat finansial)

Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.⁸

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor

⁸ Pengertian wajib pajak (On-line) tersedia di <https://pajak.go.id> di akses tanggal 7 Juni 2020

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang pajak penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objek pajak adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan tahun 1984 dan perubahannya.⁹

B. Pengertian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Usaha mikro sendiri adalah usaha produktif yang dijalankan secara perorangan dan atau suatu badan. Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,- .

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Yang masuk kriteria

⁹ Waluyo, *perpajakan Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat, 2011), hal.25

usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,-.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh) bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Pajak yang harus dibayar oleh UMKM adalah PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dll), PPh Pasal 21 (jika memiliki pegawai), PPh Pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa).

Ada perbedaan pengenaan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam perhitungan PPh. Bila karyawan UMKM memiliki gaji per bulan kurang dari

¹⁰ Pengertian UMKM On-line tersedia di https://id.m.wikipedia.org/wiki/usaha_mikro_kecil_menengah di akses tanggal 11 Januari 2021

Rp 32 juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau badan adalah PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 PPh final untuk UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran brutonya di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Namun pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru teruntuk PPh final UMKM. Tarif PPh final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi 0,5% .

C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0.5%. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4.8 milyar dalam satu tahun pajak dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5 % dari omset penjualan.¹¹

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan, (On-line) tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018> diakses tanggal 7 Juni 2020.

1. Penghasilan yang dikecualikan dari objek PP 23 tahun 2018
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
 - c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
 - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

2. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah :
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. Wajib Pajak Badan berbentuk Persekutuan Komanditer atau Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 31A atau PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahannya;
 - d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
3. Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 mengatur mengenai jangka waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini. Berdasarkan Pasal 5 disebutkan jangka waktunya adalah sebagai berikut:¹²

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak :

- 1) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- 2) Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

¹² *Ibid*, Pasal 5

D. PPh Final (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atau sering disebut sebagai PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.¹³ Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan. Tarif PPh final ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah), wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0.5% dari total peredaran bruto penjualan dalam satu bulan.¹⁴

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) dalam mardiasmo menyebutkan bahwa PPh yang bersifat final dikenakan atas penghasilan berupa:¹⁵

1. Peredaran bruto (omzet penghasilan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak,

¹³ “PPh Pasal 4 Ayat 2” (on-line), tersedia di <https://www.online-pajak.com> , diakses tanggal 5 Februari 2020

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal. 307

2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing,
3. Hadiah berupa lotere atau undian,
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan dibursa, dan transaksi perdagangan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha,
5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan atau bangunan, dan
6. Pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pengenaan PPh yang bersifat final berarti penghasilan yang diterima ataupun diperoleh akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu, PPh yang dikenakan, baik itu dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan itu.¹⁶

E. Definisi Pajak Dalam Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “*oikos*” yang berarti rumah dan “*nomos*” berarti aturan. Maksudnya adalah aturan-aturan

¹⁶ *Ibid*, hal. 309

untuk menyelenggarakan kebutuhan manusia dalam rumah tangga, baik setingkat rumah tangga rakyat maupun setingkat rumah tangga negara. Dalam bahasa arab dinamakan *al-muamalah al-madiyah*, artinya aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih tepat lagi ia dinamakan *al-iqtishad* yang artinya hemat atau sederhana.¹⁷

Menurut Abdul al-musin Sulaiman, arti kata *iqtishad*, adalah pertengahan dalam suatu perkara, tidak berlebihan atau terlalu hemat. Sedangkan menurut Heri Sudarsono, *iqtishad* berarti “umat yang pertengahan” atau bisa diartikan sebagai rezeki yang ada disekitar kita dengan cara berhemat. Dalam hal ini kenapa disebut sebagai Ekonomi Islam, sebenarnya bisa juga dinamakan Ekonomi Ilahiyah atau Ekonomi Qurani, namun agar lebih mudah saja dengan sebutan Ekonomi Islam atau bahasa yang baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁸

Kebijakan umum dalam Ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif (QS. Al-Hasyr[59] :7).

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَتْلُوا مِنَ الرُّسُولِ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁷ Gusfahmi, *pajak menurut syari'ah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 37

¹⁸ *Ibid*, hal. 38

Artinya:

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr[59] :7).¹⁹

Dengan prinsip keadilan ini, Al-Quran menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan. Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing.²⁰

2. Pajak menurut Syariat Islam

Sistem perpajakan dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (*ghanimah*), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (*fai*), zakat, pajak tanah (*kharraj*), dan pajak kepala (*jizyah*). Kecuali dua sumber

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Qs.At-Hasyr : 7, Bandung : Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2013.

²⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2009). hal.392

pertama, yang lainnya merupakan sumber penghasilan tahunan.²¹ Dalam islam sendiri anjuran membayar pajak telah dijelaskan secara tersirat dalam surah At-Taubah ayat 29, yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk (Qs.At-Taubah : 29).”²²

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban warga negara membayar pajak secara patuh terhadap negara sebagai bentuk perwujudan pengabdian dan peran rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Selain ayat di atas, di antara dasar dan panduan pembolehan pemungutan pajak adalah seperti hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

²¹ Islam Digest Republika, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamdigest/18/04/04/p6nk7k313-sistem-perpajakan-dalam-islam/> di akses tanggal 25 sep. 2020

²²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2013) Qs.At-Taubah (9) : 29 h.193

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat."²³ Hadis tersebut menunjukkan bahwa memang diperbolehkannya pemerintah untuk menarik sebagian harta penduduknya selain dari apa yang telah mereka keluarkan dari zakat, dalam hal ini adalah pajak. Namun, menurut Imam Syatibi penarikan ini tidak serta merta dipungut begitu saja, melainkan apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat. Dari ayat Alquran dan hadits di atas dapat kita pahami bahwa mengambil pajak dari masyarakat merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat sebagai bentuk ketaatannya kepada pemerintah. Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dapat digunakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, termasuk bagi UMKM, karena pajak dapat digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal permodalan maupun pembinaan.²⁴

²³ Kazwaini, (2017). "Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran alMawardi". Jurnal an-Nida, Vol. 41 No. 1, Juni 2017. <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Anida/article/download/4639/2833> (diakses pada tanggal 13 Januari 2021).

²⁴ Muhammad Turmudi, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)". Jurnal al'Adl, Vol. 8 No. 1, Januari 2015. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/353/339> (diakses pada 13 Januari 2021).

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Mu'amalah), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah SWT) maka dia adalah dzalim” (QS Al-maidah[5]:45).²⁵

Pajak Menurut Syariat secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar (*dharaba*, *yadh ribu*, *dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *sim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib*. *dharibah* disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).²⁶

Secara bahasa *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*,

²⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal.20

²⁶ *Ibid*, hal. 28

yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara.²⁷ Secara umum sumber pemasukan Negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah *zakat*, *kharaj*, *khums*, *ghanimah* dan *fa'i*, *jizyah* (pajak perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Peranannya dalam system perekonomian serta aplikasinya di beberapa Negara muslim.²⁸

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki beberapa prinsip. Salah satu prinsip yang harus di perhatikan yaitu prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya tidak keseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu maupun sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut Islam,

²⁷ As-sarahsi, al-mabsuth, dalam yahya abdurrahman, *dharibah* (pajak), <https://hayatulislam.net> di akses tanggal 28 sep 2020

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2015), hal.212

Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

3. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti ambil, diantaranya adalah :

Pertama Rury Ceptianingtyas (2019), meneliti tentang Pengaruh Penurunan Tarif Pph Final, Mekanisme Pembayaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Kpp Pratama Ilir Barat Palembang). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh final, mekanisme pembayaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah hanya menggunakan satu variabel independen yaitu penurunan tarif PPh final.²⁹

Kedua Penelitian Agnes Indiani (2018), meneliti tentang Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2016 Pada Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Final Kpp Pratama Malang Selatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil

²⁹ Rury Ceptianingtyas, "Pengaruh Penurunan Tarif Pph Final, Mekanisme Pembayaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Kpp Pratama Ilir Barat Palembang)", *Skripsi*, (Akuntansi : STIE Multi Data Palembang, 2019), hal. 35

penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016, untuk wajib pajak PPh Final mengalami kenaikan sebesar 0,78% dan Penerimaan pajak naik sebesar 1,33% sedangkan wajib pajak PPh Final BPHTB mengalami kenaikan sebesar 0,37% dan penerimaan pajak naik sebesar 0,85%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Peraturan Pemerintah yang digunakan.³⁰

Ketiga Penelitian Wahyu Rossandi (2019), meneliti tentang Analisis Penerimaan Pajak Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp. No. 23 Tahun 2018 Pada Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan pada penerapannya, kemudian sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar hanya sebesar 8,88% untuk wajib pajak, hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar hanya sebesar 5,7% untuk wajib pajak, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sehingga peningkatan dalam pertumbuhan wajib pajak tidak

³⁰ Agnes Indiani, "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2016 Pada Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Final Kpp Pratama Malang Selatan", *Skripsi*, (Akuntansi : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 108

maksimal dari sebelum penerapan peraturan ini. Perbedaan pada peneliti ini adalah objek penelitiannya.³¹

Keempat Penelitian Nangoi dan Hakim (2015), dengan judul Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Di dalam Penelitian ini yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesudah diterapkannya PP 46 tingkat tumbuhan WP dialami turun senilai 0,23%, melainkan rata-rata yang terjadi pada pemasukan PPh final dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan setelah penerapan pp no. 46 2013 menghasilkan 3,89% yang ini masih sekali kurang dari kriteria yang ditentukan.³²

Kelima Penelitian Wahyu Suryani, Maslichah, dan Junaidi (2019), meneliti tentang Pengaruh Pengalihan Pp 46 2013 Menjadi Pp 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji hipotesis menggunakan uji *Mann Whitney Test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beda tingkat tumbuhnya Wajib Pajak UMKM awal dan sesudah pengalihan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tetapi tidak ada beda tingkat

³¹ Wahyu Rossandi , “Analisis Penerimaan Pajak Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 Pada Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu”, *Skripsi*, (Akuntansi : Universitas Muhamadiyah Palembang, 2019), hal.55

³² Fadli Hakim dan Grace B. Nangoi, “Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado, *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.787-795

pendapatan PPh final awal dan setelah pengalihan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.³³

Keenam penelitian Wulan Puspitasari (2011), meneliti tentang Dampak Penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji hipotesis menggunakan uji *Mann Whitney Test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak PPh mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sedangkan pada penerimaan pajaknya mengalami penurunan. Hal ini berarti dengan adanya penambahan jumlah wajib pajak PPh tidak selalu menjamin terjadinya peningkatan terhadap penerimaan pajak.³⁴

Dari penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu yang menjadi salah satu rujukan peneliti, dengan letak perbedaannya penelitian yang hendak peneliti teliti dari segi objek penelitiannya, yakni peneliti menggunakan sampel Perusahaan yang berbeda dan tahun yang berbeda. Peneliti mengambil Perusahaan yang terletak di Bandar Lampung, Kec. Kedaton yaitu di KPP Pratama Kedaton dan data yang diambil adalah sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

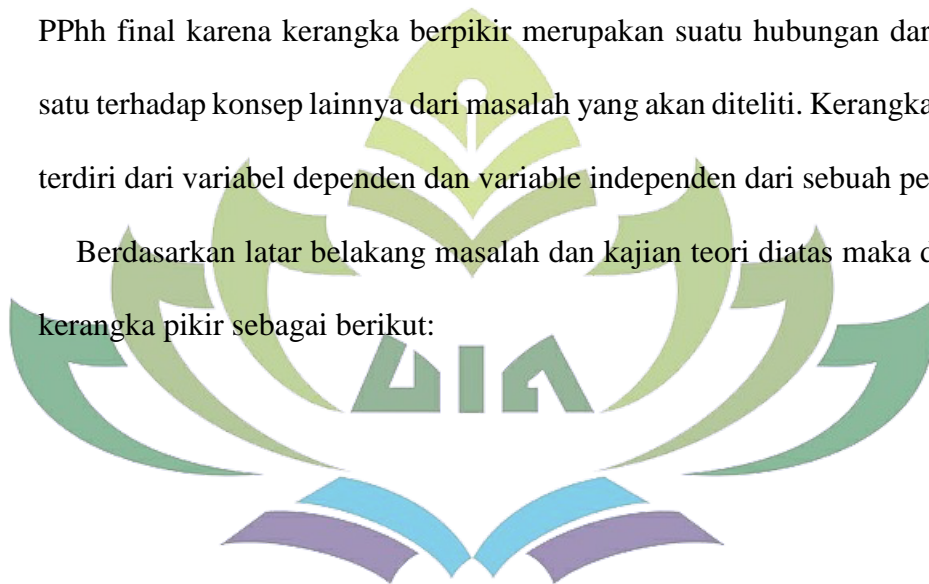
³³ Wahyu Suryani, Maslichah, dan Junaidi, "Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi Pp 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan", *E-JRA*, Vol. 8 No. 2, (februari 2019), hal. 32-41

³⁴ Wulan Puspitasari, "Dampak Penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak", *Skripsi*, (Akuntansi, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2011) hal. 111

G. Kerangka Fikir

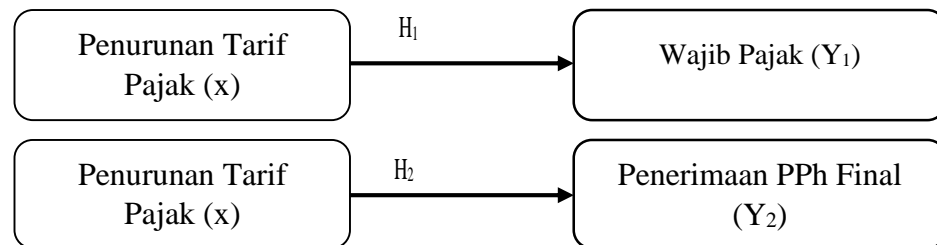
Kerangka fikir merupakan sebuah sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan yang pada dasarnya merupakan gambaran secara sistematis dari kinerja dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.³⁵ Kerangka pikir dirancang agar dapat lebih memahami tentang konsep dari penelitian yaitu menganalisis pengaruh penurunan tarif pajak terhadap pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan atas PPh final karena kerangka berpikir merupakan suatu hubungan dari konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir terdiri dari variabel dependen dan variable independen dari sebuah penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori diatas maka diperoleh kerangka pikir sebagai berikut:



³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 88.

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Keterangan :

—————> Hubungan antar variabel

Sumber : Data diolah sendiri (2020)

H. Hipotesis

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.³⁶ Penentuan hipotesis sendiri berdasarkan pada kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat perbedaan pada jumlah wajib pajak di KPP Pratama Kedaton setelah penurunan tarif pajak umkm

H_{a1} : Terdapat perbedaan pada jumlah wajib pajak di KPP Pratama Kedaton setelah penurunan tarif pajak umkm

Ho: Tidak terdapat perbedaan pada penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Kedaton setelah penurunan tarif pajak umkm

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 64.

H_{a2}: Terdapat perbedaan pada penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 di KPP
Pratama Kedaton setelah penurunan tarif pajak umkm



Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- As-sarahsi, al-mabsuth, dalam yahya abdurrahman, *dharibah* (pajak), <https://hayatulislam.net> di akses tanggal 28 september 2020
- Ceptianingtyas, Rury, Pengaruh Penurunan Tarif Pph Final, Mekanisme Pembayaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Kpp Pratama Ilir Barat Palembang), *Skripsi*, Akuntansi : STIE Multi Data Palembang, 2019.
- Chandrarin, Grahita, *Metode Riset Akuntansi*, Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Qs.At-Taubah : 29, Bandung : Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Qs.At-Hasyr : 7, Bandung : Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2013.
- Emzir, *metodelogi penelitian pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Fuad Chalil, Zaki ., *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hakim, Fadli dan Grace B. Nangoi, "Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado, *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1 Maret 2015.
- Hartanto, Dicki, *Manajemen Keuangan Perusahaan Tinjauan Integratif*, Pekanbaru: CV. MPS, 2014.
- Islam Digest Republika, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamdigest/18/04/04/p6nk7k313-sistem-perpajakan-dalam-islam/> di akses tanggal 25 september 2020 .
- Indiani, Agnes, Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2016 Pada Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Final Kpp Pratama Malang Selatan, *Skripsi*, Akuntansi : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Jumlah data penduduk Indonesia, (On-line), tersedia di <https://databoks.katadata.co.id> diakses tanggal 19 mei 2020.

Kazwaini, “Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran *alMawardi*”. *Jurnal an-Nida*, Vol. 41 No. 1, Juni 2017. <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Anida/article/download/4639/2833> (diakses pada tanggal 13 Januari 2021).

Kontribusi Pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (On-line), tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> diakses tanggal 19 mei 2020.

Macam-macam pajak, (On-line), tersedia di <https://www.online-pajak.com/macam-macam-pajak> diakses tanggal 19 mei 2020.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2008.

Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta: Andi, 2016.

Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta: Andi, 2018.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Objek pajak (On-line) tersedia di <https://www.online-pajak.com> di akses tanggal 2 Juli 2020.

Pahala Siahaan, Marihot, *Hukum Pajak Elementer : Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Pengaruh. (On-line), tersedia di <https://kbbi.web.id/pengaruh> , diakses tanggal 23 Desember 2019.

Penurunan (On-Line), tersedia di <https://kbbi.web.id/penurunan>, di akses tanggal 23 Desember 2019

Pengertian wajib pajak (On-line) tersedia di <https://pajak.go.id> di akses tanggal 7 Juni 2020.

Pentingnya pajak UMKM, (On-line), tersedia di <https://pajak.go.id/artikel/kebijakan-pph-final-setengah-persen-bagi-umkm-dua-sisi-mata-uang> diakses tanggal 7 Juni 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan, (On-line) tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018> diakses tanggal 7 Juni 2020.

Perubahan undang-undang penghasilan (On-line) tersedia di <https://www.pajak.go.id> di akses tanggal 6 juli 2020.

PPh Pasal 4 Ayat 2” (on-line), tersedia di <https://www.online-pajak.com> , diakses tanggal 5 Februari 2020.

Puspitasari. Wulan, “Dampak Penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak”, *Skripsi*, (Akuntansi, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2011

Rossandi , Wahyu , Analisis Penerimaan Pajak Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 Pada Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu, *Skripsi*, Akuntansi : Universitas Muhamadiyah Palembang, 2019.

Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi,(Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2015

Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat : 2016.

Setia Atmaja, Lukas, *Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta, CV. Andi Offset : 2009.

Soemitro, Rochmat. *Asas dan dasar Perpajakan 1*, Bandung : Refika Aditama, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sularsih, Helmi. “Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak Umkm Di Kota Malang”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 3, 2018.

Sumber Data Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 24 juli 2020, Pukul 02.15 WIB.

Sumarsan , Thomas, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Indeks, 2013.

Supranto, J. *Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi ke enam*, Jakarta : Erlangga, 2001.

Suryani, Wahyu, Pengaruh Pengalihan Pp 46 2013 Menjadi Pp 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Di Kpp Pratama Pasuruan, *E-JRA*, Vol. 08 No. 02, Februari 2019.

Takhkim, Muhamad., “Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat”. *E-Journal IAIN Ngawi*, 2016. On-line <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/142> (diakses pada tanggal 13 Januari 2021).

Turmudi, Muhammad., “Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)”. *Jurnal al’Adl*, Vol. 8 No. 1, Januari 2015. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/353/339> (diakses pada 13 Januari 2021).

Undang-Undang tentang subjek pajak, UU. No. 36 Tahun 2008, Pasal 2.

Waluyo, *perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.

Wahana Komputer, “*Mengelola Data Statistik Hasil Penelitian Dengan SPSS 19*”, Yogyakarta : Badan Penerbit Andi, 2010.

